20–30. 01. 2002

JFAC

Jogja
Fine Art
Community

RPUSTAKAAN
san Seni Cemeti

IALOG
ISUAL
JA ETNIK

opening on sunday, 7.30 pm

Dialog Visual Dua Etnik

Dalam pemahaman yang sederhana, etnik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok sosial yang memakai bahasa yang sama, menganut agama yang sama, atau bercirikan budaya yang sama (Stanley, 1999). Namun dalam prakteknya, dapat saja satu kelompok mendapatkan sebutan yang bermacam-macam menurut situasinya. Misalnya, di Amerika Serikat si kulit hitam disebut *Negro*, tetapi jika mereka pindah ke Meksiko, sebutannya *Yankee*. Sebutan pertama tadi bersifat rasial, sementara sebutan kedua lebih bersifat etnik atau kultural.

Dalam realitas yang kita temukan saat ini, antara pemahaman tentang ras dengan pemahaman tentang etnik sering saling teranyam. Misalnya di Jerman ketika penguasa Nazi masih begitu hegemonik sebelum perang dunia kedua, kaum Yahudi terutama dipandang sebagai ras, tetapi di negara-negara Timur Tengah mereka dipandang sebagai kelompok etnis saja. Sedangkan di Indonesia, warga keturunan Cina seringkali dianggap sebagai kelompok ras. Tak banyak orang mengingat atau mau memahami bahwa sesungguhnya istilah "ras Cina" tidak tepat. Yang benar adalah "ras Mongoloid", seperti halnya "bangsa" Korea, Jepang, Vietnam, Thailand, Laos, Birma, Hongkong, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Juga bangsa Indian di Amerika, Chile, Paraguay, Guatemala dan Brasil.

Ras sendiri, menurut antropolog Grosse, dibatasi sebagai segolongan manusia yang merupakan satu kesatuan karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan, sehingga dapat dibedakan satu sama lainnya. Dengan demikian, ras merujuk ke kelompok manusia yang ditentukan oleh dirinya sendiri atau pihak lain, yang berlainan secara kultural berdasarkan ciri-ciri jasmaniah yang tak dapat

diubah. Ras ditentukan bukan secara sosial melainkan berdasarkan ciri-ciri fisik. Ciri tersebut tak penting secara inheren dan baru penting jika ditujukan ke luar masyarakat. Ada tiga ras utama di dunia -- yang diteorikan pertama kali oleh Eugen Fisher pada tahun 1923 -- yakni ras Kaukasoid, ras Negroid, dan ras Mongolid yang berpopulasi sekitar 37 % dari seluruh penduduk dunia.

Untuk konteks Indonesia, perbincangan tentang etnik masih begitu kuat bersandar menjadi "politik identitas" yang dikembangkan oleh rezim Soeharto. Etnik Dayak misalnya, diintroduksikan sebagai suku yang antara lain berperilaku kurang beradab yakni membuang begitu saja jenasah atau orang mati ke dalam hutan. Atau tentang tradisi *nomaden*-nya yang dituduh memungkinkan melakukan perusakan hutan secara evolutif. Begitu juga etnik Madura diberi salah satu identifikasi sebagai etnik yang acap menyelesaikan problem personal maupun komunalnya dengan medium kekerasan, *carok*. Juga identifikasi lain yang melekat yang sempat dieksploitasi habis-habisan yakni tentang seks dengan segenap lingkar kompleksitasnya: jamu kuat, humor seks dan semacamnya. Etnik Timor (Timur) diperkenalkan sebagai penyuka pesta-pora tanpa berpijak pada realitas keseharinnya. Etnik Jawa diberi figura sebagai etnik yang feodalistik, kurang tanggap dengan nilai-nilai demokrasi dan kuat mengadaptasi budaya patriarkhi.

Semuanya dibingkai sebagai rentetan "pesona" semu keberagaman yang ada dalam semesta Indonesia. Dan ujung-ujungnya adalah sebuah tawaran solusi atas keberagaman tersebut dengan keseragaman. Bagi rezim Soeharto keberagaman atau pun heterogenitas harus ditundukkan dengan kebijakan yang "heroik" yakni memaksakan konstruksi keseragaman dan homogenitas. Pluralitas harus ditekan menjadi singularitas. Dan jargon persatuan dan kesatuan menjadi tombak kebijakan Soeharto untuk meneguhkan keseragaman, menolak keberagaman. Persatuan dan

G1.1.501/FSC/H/02

kesatuan sekadar sebatas slogan tanpa memuarakan pengakuan akan kebhinekaan. Ketika Soeharto runtuh, bangunan besar tapi rapuh itu pun ikut terjerembab. Dan Indonesia pun memanen konflik horisontal berupa perseteruan etnik, penyelewengan makna demokrasi, inflasi nilai kebebasan, demokrasi dan sebagainya.

***

Pameran yang mempertemukan empat pelukis dari dua etnik ini, Minangkabau (baca: Padang) dan Bali, tidak serta-merta dibingkai dalam upaya antitesis atas kebijakan Soeharto di masa lampau. Ini bukanlah sebuah heroisme picisan untuk menjawab dan mengakomodasi keberagaman dan heterogenitas sebagai mata air demokrasi, misalnya. Tak segagah itu! Etnisitas yang muncul di sini adalah sekadar sebuah celah mungil untuk dimungkinkan sebagai cara melihat kecenderungan tertentu yang dibawa oleh anak-anaknya. Untuk konteks seni rupa (Yogyakarta) dewasa ini, paling tidak dalam lima tahun terakhir ini, para perupa yang berasal dari dua etnik ini memiliki tempat tersendiri. Meski kita tak akan secara langsung membuat sebuah justifikasi yang bertumpu pada kualitas karya mereka, tetapi yang perlu diperbincangkan secara seksama adalah bagaimana anak-anak Padang dan Bali cukup kuat memberi warna pada konstelasi seni rupa Yogyakarta.

Anak-anak Bali (di Yogyakarta) telah lama memiliki Sanggar Dewata dan sudah memberi *out-put* berarti dengan beberapa parameter, sekecil apapun. Sebut saja kualitas visual, kecenderungan gaya dan corak yang mulai beranjak lepas dari tradisi ibunya, juga ukuran-ukuran lain (yang kadang dipandang naif dengan sebelah mata) seperti karya yang diakomodasi dengan baik oleh pasar dan masuk dalam tempat terhormat pada sebuah ajang kompetisi (negatif apapun reaksi beberapa kalangan terhadap karya seni yang dikompetisikan). Demikian juga dengan anak-anak

I Made Palguna, Gopala Jaya, 100 x 120 cm, 2001,mixed media on canvas

Padang -- lama setelah berdirinya Sanggar Dewata -- yang membingkai diri dengan komunitas Sakato. Atau sebelumnya -- dengan kuantitas yang lebih terbatas -- ada Kelompok Jendela.

Andai dicoba diperbandingkan dengan kelompok etnik lain yang ada di lingkungan perupa di Yogyakarta, relatif dua etnik inilah yang memiliki spirit komunalitas tinggi. Entah bahwa pada akhirnya mereka akan justru diasumsikan kering akan sikap inklusif, tetapi diakui atau tidak, komunalitas tersebut bermuara pada semangat kreatif pula. Meski juga hal terakhir itu bisa menjadi bahan perdebatan, misalnya tumbuhnya peluang epigonisme antara yunior terhadap senior dalam berproses kreatif. Ini cukup tampak pada anak-anak Bali yang pada medio 1990-an tiba-tiba mengharu-biru kanvas-kanvasnya dengan abstrak ekspresionisme. Dan ini melahirkan sinisme atau mungkin sekadar sebuah isyarat identifikasi atas mereka: kalau abstrak ekspresionisme dan berformat lebih dari satu meter persegi, hampir pasti itu adalah lukisan anak Bali. Demikian juga akhir-akhir ini ketika kita menemukan kecenderungan bentangan karya-karya lukis abstrak amorfik yang simplistik, asosiasi kita kurang lebih akan mengerucut pada sebuah konklusi: "Lukisan anak Padang, *nih*!"

Barangkali naif. Barangkali ini sebuah generalisasi kaku tanpa berpijak penuh pada realitas obyektif. Tetapi, sungguh, ini adalah sebuah kecenderungan yang bisa ditangkap dari pergaulan kita dengan beragam perupa yang ada di Yogyakarta, baik secara personal maupun komunal. Sampai di sini, tak secuil pun tendensi untuk menilai baik atau buruk atas kecenderungan itu. Juga ketika kita mempertemukan dua pelukis Padang dan dua pelukis Bali, tak ada setitik pun upaya untuk mengkompetisikan mereka berempat. Semuanya mengalir sebagai upaya apresiasi atas keberagaman, penghargaan terhadap nilai diferensiasi. Demikian juga halnya tatkala kenapa dipilih Jumaldi Alfi dan Aidis Sukri (Padang) lalu Palguna dan Jangkrik (Bali), jelas tak

berupaya mencomot sosok paling "jagoan" dari kedua komunitas tersebut. Apakah mereka diasumsikan sebagai pembawa *trend* Neo-Padang atau Neo-Bali padakanvas-kanvas mereka, wallahu'alam, kita tak bisa dengan segera bersepakat. Tetapi juga tak bisa dengan serta-merta menolaknya.

Paling tidak anak-anak Bali justru kian bersinar ketika mereka berproses di Yogyakarta, bukan di tanah leluhurnya yang meyakini bahwa jalan berkesenian, dalam tradisi Hindu, adalah salah satu jalan untuk beribadah. Demikian juga dengan anak-anak Padang yang menemukan *peak-performance*-nya saat berkeputusan "beribadah" merantau menjadi perupa di kota Gudeg. Tetapi uniknya, justru mereka mulai melepaskan akar tradisi yang kuat membebatnya. Anak-anak Bali tak bersikukuh mengeksplorasi gaya lukisan Kamasan yang eksotik-turistik itu. Demikian juga anak-anak Padang tak mengikatkan diri secara kuat pada lukisan-lukisan yang berspirit Islam, misalnya. Semuanya bagai lari bebas dalam jalan tol yang telah lapang tersedia di supermall seni rupa bernama Yogyakarta. Ada lembaga pendidikan formal ISI yang menggayutkan mereka pada upaya pendalaman bernalar (kalau memang ada di sana) dan pencarian kebaruan, modernitas atau apapun namanya. Dan ada komunalisme Yogyakarta yang memungkinkan mereka merunuti keliaran, atau menjadi Malin Kundang atas akar tradisi asalnya.

Maka pada pameran ini, JFAC, Jogja Fine Art Community memfasilitasi kemungkinan memperbincangkan kemungkinan aspek berkesenian sebagai salah satu jawaban, kecil sekalipun, terhadap pesona heterogenitas, eksotisme keberagaman. Tentu tak ada dimensi politis yang *neko-neko* di dalamnya yang sekarang ini gampang melahirkan politisi-entertainer atau pengamat politik yang entertainer di layar televisi. ***

A R
FOUNDAT
DOKUMENT

I Nyoman Triarta, Terikat ,200 x 145 cm, 2001, acrylic on canvas

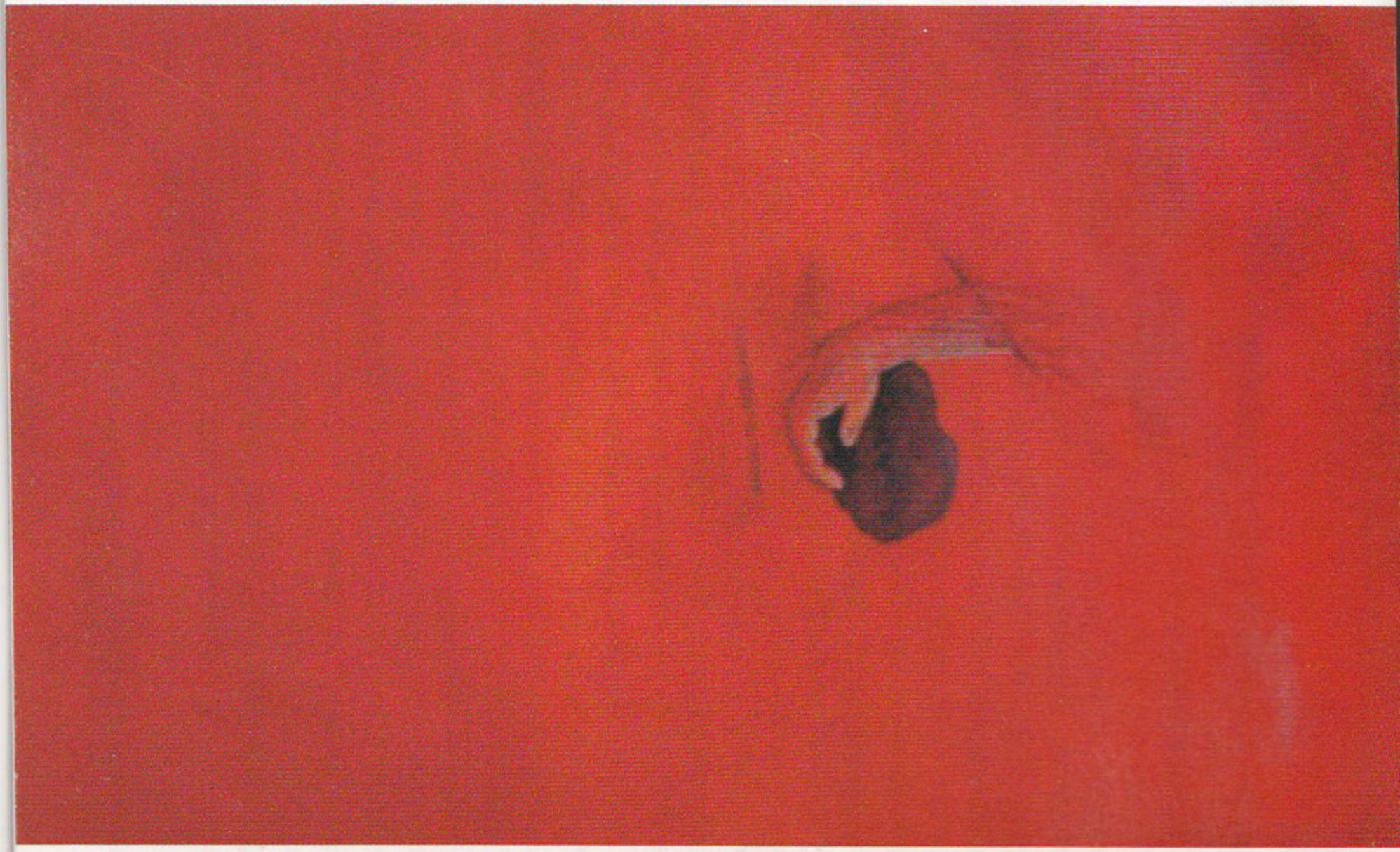

Jumaldi Alfi, Cukup, 75 x 125 cm, 2001, acrylic on canvas

Jembatan Alternatif bagi Pluralisasi[1]

Arie Sujito[2]

Barangkali, kejenuhan dan kepengapan, selalu melanda di lingkungan kita. Keseharian diliputi oleh rutinitas, mekanisasi, keterbatasan, pragmatisme, kecurigaan, represi dan, stigmatisisasi. Kata sebagian orang, kita hidup dalam dunia sakit. Hamparan luas imajinasi sebagai sosok manusia selalu terciutkan oleh politik yang bengis, realitas sosial yang diskriminatif, dan kultur penakut. Kelangkaan suasana bebas yang sedang kita rasakan, nampaknya, dihadapkan pada sejumlah keinginan manusia untuk maju, berubah dan dinamis. Berlangsungnya benturan suasana seperti itu, setidaknya, melahirkan tiga kecenderungan sikap. *Pertama*, pragmatisme; *kedua*, hegemonik dan; *ketiga*, kritisisme.

Bentuk-bentuk pragmatisme, untuk artian kaum awam, terwujud melalui cara penyerahan diri dalam belenggu kepentingan jangka pendek. Apa yang "diakui" dan berlangsung adalah garis yang harus ditaati, tanpa mewajibkan kesadaran panjang. Sementara hegemonik lebih dilandasi oleh derajat ketaklukan oleh realitas, yang dianggapnya memang sudah "sesuai dan benar adanya". Mengurangi, menafsir dan melawan realitas berarti bentuk deviasi. Di luar keduanya adalah sikap kritis, yang membangun semangat "tidak harus ini atau itu", namun justru bergerak keluar atas "realitas umum" itu sendiri. Kuncinya adalah, alternatif dan pluralis.

Nah, ketiga sikap itu memang selalu bersitegang memperebutkan

[1] Catatan atas gagasan pameran untuk fasilitas perupa "Bali" dan " Padang"

[2] *Arie Sujito Dosen Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM*

lahan di dunia yang terus cepat berubah seperti ini.

Di negeri yang namanya Indonesia, yang konon sering dilanda bencana sosial, tragedi politik dan prahara budaya, dapat tergambarkan atas fenomena itu. Kita hidup dalam komunitas plural, secara alamiah. Kelas dan stratifikasi yang bertingkat dan, jelas sangat diskrepansif. Polarisasi dan diferensiasi etnik, ras dan sub kultur sejenis.

Mestinya, keberagaman ini akan membantu terbangunnya gugus dunia sosial sejati, Indonesia *nan* indah. Syaratnya adalah, pluralisasi itu membutuhkan ketepatan kelola melalui dasar fasilitasi dan emansipasi. Dan, dengan demikian perbedaan dipahami sebagai rahmat yang diolah sebagai semen sosial, dalam bentuk toleransi atau penghargaan menuju kedamaian. Itulah, mungkin mimpi teoritis dan ambisi rasa kita.

Sayang, dunia cita selalu dihadang oleh belukar kekuasaan, dari manapun asalnya. Pengalaman panjang dijaman politik yang serba "stabil" pada masa orde baru, telah memberikan pelajaran atas fakta itu. Pengingkaran selalu menjadi alat peneguhan agar otoritas menjadi langgeng. Mantra-mantra *heroik* semacam "bhinneka tunggal ika" yang konon secara konseptual dibangun dalam filsafati kebersamaan dalam keberagaman , toh dijerumuskan dengan logika manipulatif. Malahan, praktiknya berlawanan dengan demokrasi. Kita dipaksa untuk tidak jujur, bahwa kita itu dilahirkan berbeda karena itulah, hal yang *lumrah*. Proyek politik penyeragaman digelar dengan menghancurkan "perbedaan" demi harmoni. Hasilnya, memang luar biasa *brengseknya*. Secara simbolik terjadi integrasi politik, tetapi secara substantif beroperasi disintegrasi sosial. Kini, generasi pasca otoritarian itu tertimpa akibat yang besar. Konflik dan kekerasan antar kelompok, kekacauan dan kerusuhan sosial yang menelan korban kaum papa yang tak terhitung. Dimana-maa sengketa, memilukan kita semua.

ART FOUNDATION
DOKUMENTASI

Aidis Syukri
Menuju rumah idaman
127 x 90 cm, 2002
acrylic on canvas

Tanpa bermaksud meratapi dan merintih sakit terus menerus akibat terpaan gelombang "cobaan" ini, nampaknya, kita menemukan momentum agar menghentikan pertikaian di antara kita. Lalu, mencari dan menyelesaikan akar persoalan itu.

Semenjak konsensus perubahanan dicanangkan, "reformasi" disusun, lalu menerbitkan sejumlah optimisme. Meskipun nampak berjalan terseok-seok akibat beban yang berat, inilah jaman kemenangan yang sudah ditunggu-tunggu. Bagaimana ini dipahami dan diupayakan?

Geliat untuk membangun kebersamaan di tengah kemajemukan sosial diantara kita, memang butuh arena 'bergaul". Kegelisahan atas kepengapan sebagaimana terulas di atas, perlu disalurkan dalam ruang bertegur sapa, mempersoalkan apapun yang terjadi. Semestinya, harus menyudahi sekat-sekat yang membelenggu, sama-sama kita menghancurkan belukar hambatan, dan membongkarnya melalui tusukan ide-ide, pikiran bahkan tindakan kolektif demi tumbuhnya peradaban baru. Suatu kondisi bermartabat, yang konon dijuluki dengan *civil society* itu. Ia ditandai oleh terbangunnya sistem sosial, struktur politik dan budaya yang anti dominasi, kesemuai itu menumbuhkan derajat semangat emansipasi. Syaratnya adalah, tersedia ruang publik sebagai ajang untuk "mempersoalkan" segala sesuatu yang berkenaaan interaksi di antara kita. Dengan kata lain, tidak ada monopoli, siapa pun kita. Yang kaya, miskin, "berpendidikan", buta sekolah, berdasi, jembel, perempuan, laki-laki, dan siapa pun. Tidak ada diskriminasi.

Seni, nampaknya dihadirkan sebagai salah satu alternatif mengemban amanah itu. Kendatipun, seni bisa melahirkan hegemoni -- terutama akibat monopoli tafsir seni untuk kepentingan politik jangka pendek -- tapi, dalam beberapa bukti ia menunjukkan bahwa seni mampu menjadi media pemberontakan, virus untuk penyebaran liberasi. Dari seni

pula, ruang dan arena komunikasi dihidupkan untuk memfasilitasi sejumlah perbedaan itu. Konsepnya adalah, memang seni bukan barang mati, statis dan selalu menjadi objek tak bermakna. Tetapi, sebaliknya seni ditempatkan "hidup" dalam suasana dinamik dan bermakna.

Maka itu, inisiasi menempatkan seni sebagai sentrum "gerakan" alternatif membangun peradaban yang, pada akhir-akhirnya ini kian populer, menjadi bisa dipahami. Upaya fasilitasi berbagai aliran seni yang berkembang di negeri ini, dan tersebar di berbagai lahan sosial, ekonomi dan politik, baik berbasiskan etnik atau pilihan-pilihan dengan rasionalitas baru, nampaknya banyak digagas sebagai salah satu alternatif untuk menjawab keinginan kebersamaan itu, menembus kebuntuan. Memang, sukar untuk dielakkan konsekuensi dari itu semua adalah berlangsungnya kompetisi antar aliran seni untuk mampu eksis merebut "makna positif" dihadapan masyarakat, meski kesemua itu memiliki indikator yang berbeda-beda.

Dengan kata lain, gagasan mempertemukan kaum perupa dengan basis etnik "bali" dan "padang", sebagaimana dilakukan JFAC, Jogja Fine Art Community saat ini, setidaknya dapat dibaca sebagai langkah ujicoba "persahabatan seni" bagi emansipasi kaum muda. Ini memang bukan barang mewah, tetapi menjadi bermakna penting bagi kehidupan sosial yang ragam di antara kita untuk menjadi saluran ekspresi etnisitas secara konstruktif. Maknanya tentu positif. Di mana, penggambaran implisit atas gagasan itu tidak lain adalah semangat anyaman demi keindahan, bukan reproduksi penguatan sekat atau tembok baja, dan "egoisme kelompok" lalu menghasilkan permusuhan. Tetapi, merupakan bentuk solidaritas ide dan karya partisipatorik.

Jika dibaca secara lebih luas, kita perlu mengakui betapa sulitnya rajutan di tingkat praksis atas keragaman perbedaan berbasiskan kultural

itu dibentuk. Mungkin, kita bisa berkaca atas sejumlah perselisihan berdarah di negeri ini, yang selalu saja disusun dan digerakkan melalui sentimen suku dan agama, atau aliran apapun, dalam fase dua tahun terakhir. Menguatnya stigmatisasi, dengan dilandasi oleh penilaian sempit atas "orang lain", semakin memerosokkan pada keingkaran pada hakekat keberagaman di antara kita. Dunia sosial kian beku. Inikah keinginan kita, untuk kembali mundur ke peradaban *barbarianis* yang penuh *horor*? Tentu saja tidak.

Mungkin, bukan semata simbolik yang ditonjolkan untuk membaca apa yang sedang diinisiasi kaum bunga di negeri "orang lain" ini, atau sekadar semangat ritualistik. Tetapi, justru pesan agar menempatkan penghargaan pilihan alternatif yang plural ini yang lebih urgen untuk ditangkap. Realistis saja, di Yogyakarta atau mungkin juga di tempat lain, memang mulai mekar semangat komunalisme dalam membaca fenomena atau interaksi kepentingan. Apakah ini semata-mata sebagai ancaman atau bentuk penyempitan kesadaran?

Bisa "ya", jikalau perbedaan dan konflik dianggap sebagai unsur kehancuran struktur sosial. Tetapi, bisa "tidak", karena kedaerahan atau komunalisme justru menjadi positif saat perbedaan itu dilandasi demi bangunan kohesi sosial. Ini memang tantangan yang tidak gampang untuk diuji atau dioperasikan dalam wacana, apalagi di tingkatan praktis. Karena itulah rangkaian potensi dan aktualisasi hendaknya difasilitasi dengan jembatan komunikatif, melalui arena atau media secara kolektif. Melalui ruang alternatif seni, persahabatan menjadi cair. Semoga gagasan ini "memprovokasi" bagi bangkitnya karya-karya alternatif demi "gerakan pembebasan" dari ancaman, hambatan dan belenggu mitos-mitos. Selamat "berkarya dan bersahabat" kaum muda. Mari sama-sama belajar untuk itu!***

Made A. Palguna

Ubud Kelod, 12 Oktober 1976

2001, Pameran Tunggal 'Premature' Taman Budaya Denpasar, 2000 Pameran Tunggal 'Anjing' Bentara Budaya Jogjakarta, Pameran Tunggal 'Mengintip Monolog' Galeri Santi, 1999 Pameran Tunggal 'Celebration' Shop House Singapura, Pameran Tunggal 'Monolog' Galeri Padi Bandung, 1998 Pameran Tunggal di Kohara Gallery California, USA, 1997 Pameran Tunggal di Nakskov Gymnasium Denmark.Tahun 1996 - sekarang aktif mengikuti pameran bersama dalam dan luar negeri.

I Nyoman Triarta Adi Putra

11 Desember 1973

2001,Pameran Tunggal Edwin Gallery Jakarta, Pameran bersama Gelaran Budaya, Pameran Philip Morris Galeri Nasional, Greget'95 Purna Budaya Jogjakarta, Pameran 30 th Sanggar Dewata Indonesia Galeri Nasional, Pameran 'Suara Hati' Bentara Budaya Jogjakarta, Stigma Urban Edwin Galllery.

Aidi Syukri

Padang, 7 Desember 1969

2001 Pameran Kelompok 'Semut II' Purna Budaya Jogjakarta, Pameran Bias Edwin Gallery Jakarta, Pameran 'Sakato IV' Purna Budaya Jogjakarta, Par Kecil Itu Indah Edwin Gallery Jakarta.

Jumaldi Alfi

Lintau, 19 Juli 1973

1998 Pameran Tunggal di 'Aikon' Jogjakarta, 2001 Pameran Tunggal Galeri L Jakarta, Pameran Tunggal Bentara Budaya Jogjakarta. 2001 Pameran Sa Sakato, Pameran Kelompok Jendela Jogjakarta, Pameran Sanggar Sakato, Kepala Rumah Seni Cemeti, Pameran Kelompok Jendela TIM Jakarta, Par dengan Sanggar " SEKATO" di Yogyakarta, Pameran dengan Sanggar De Indonesia di Galeri Nasional Jakarta, Pameran " Not Just the Political" di Gal Widayat Mungkit Magelang

PE
Yay

Dialog Visual Dua Etnik
JFAC, Jogja Fine Art Community
20 - 30 Januari 2002

Kurasi :
A. Anzieb, Kuss Indarto
Naskah Katalog :
Kuss Indarto , Arie Sujito

C 500 exp.only
Desain Katalog: Petakumpet (0274) 373847
Hak Cipta: JFAC, Jogja Fine Art Community

Foto Lukisan: A. Anzieb